

**ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR YANG
BERKELANJUTAN DI KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Oleh

**ANDI NURUL ILMI
STB 45 14 042 030**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR YANG
BERKELANJUTAN DI KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Diajukan ntuk Memenuhi Salah Satusyarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik (ST)

Oleh

**ANDI NURUL ILMI
STB 45 14 042 030**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

UJIAN AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR YANG
BERKELANJUTAN DI KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI NURUL ILMI
45 14 042 030

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ir. Hj. RAHMAWATI RAHMAN, M.Si
NIDN : 09-070468-01

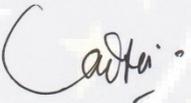

Ir. JUFRIADI, ST. MSP
NIDN : 09-310168-02

MENGETAHUI;

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Dr. RIDWAN ST.M.Si
NIDN : 09-101271-01


Ir. JUFRIADI, ST. MSP
NIDN : 09-310168-02

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor A.349/SK/FT/UNIBOS/IX/2018 pada tanggal 28 September 2018 tentang PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 28 September 2018

Nama : Andi Nurul Ilmi

Nomor Pokok : 45 14 042 030

Telah diterima dan disahkan panitia ujian Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan tim penguji Ujian Skripsi Sarjana dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Peencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Ir. Rudi Latif, .M.Si

Sekretaris : Ir. Ilham Yahya, . ST, MSP

Anggota : Ir. Hj. Rahmawati Rahman, .M.Si

Ir. Jufriadi, .ST, MSP

Disahkan :

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Bosowa Makassar

Dr. Bidwan, .ST, .M.Si

NIDN : 09101127101

Diketahui:

Ketua Jurusan

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Jufriadi, .ST, .MSP

NIDN : 093101682

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Nurul Ilmi

Stambuk : 45 14 042 030

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya skripsi, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/ sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2018

Yang menyatakan,

Andi Nurul Ilmi

ABSTRAK

Andi Nurul Ilmi, 2018 'Analisis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh Ibu Ir. Rahmawati Rachman M.Si selaku Pembimbing I Dan Bapak Ir. Jufriadi,ST,.MSP selaku pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sumberdaya pesisir dan untuk mengetahui perkembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey di Kecamatan Galesong Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui survey lapangan, wawancara, dan instansi terkait. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Skalogram dan Analisis Swot.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian daerah di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar mengalami tingkatan perkembangan kondisi potensi sumberdaya pesisir yang baik.

Dari data-data dan hasil analisis, maka dibutuhkan pengembangan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan dan harus melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Kata Kunci : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Perkembangan

Kawasan Pesisir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang telah dilimpahkan rahmat kekuatan dan kemampuan untuk menyusun tugas akhir (skripsi) berjudul “**Analisis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar**” yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik.

Penulis menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang datang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, namun syukur Alhamdulillah dengan doa, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui. Pada kesempatan ini pula tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Hamsina ST M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang telah mengesahkan dan mengeluarkan secara resmi surat SK judul Penelitian dan Pembimbing sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.

2. Ibu Ir. Rahmawati Rachman M.Si selaku dosen Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ir. Jufriadi ST.MSP selaku Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, doa dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Kepada Dosen Penguji Ir.Rudi Latief, M.Si dan Ir.Ilham Yahya ST,MSP yangtelah memberi masukan dan saran kepada penulis.
5. Kepada Kepala Tata Usaha Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak membantu untuk mengurus administrasi penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya kesabaran, doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis ini.
7. Teman seperjuangan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa terkhususnya MAP14
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai insan biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis jika skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, September 2018

Penyusun,

Andi Nurul Ilmi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Wilayah Pesisir.....	13
B. Karakteristik Wilayah Pesisir.....	15
C. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir.....	16
D. Pengembangan Wilayah Pesisir.....	17
E. Pendekatan-pendekatan Pengembangan Wilayah Pesisir.....	22
F. Potensi Sumberdaya Pesisir.....	25

G. Pengembangan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.....	27
H. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan dan Terpadu.....	35
1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan	35
2. Isu-isu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir	37
3. Tujuan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir	41
4. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir	44
5. Prinsip Dasar (asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu ..	46
I. Kerangka Pikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Waktu Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Variabel Penelitian.....	52
G. Metode Analisis Data.....	54
H. Definisi Operasional.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Takalar.....	60

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Galesong Selatan..	64
a. Letak Geografis.....	64
b. Kependudukan.....	66
1) Jumlah Penduduk.....	66
2) Perkembangan Penduduk Dua Tahun Terakhir.....	67
3) Kepadatan Penduduk.....	68
4) Penduduk Dengan Mata Pencaharian	69
c. Kondisi Fisik Pantai dan Sumberdaya Pesisir.....	70
1) Hydro-Oceanografi.....	71
2) Bathimetri.....	73
3) Ekosistem Pesisir.....	73
4) Perikanan.....	75
5) Obyek Wisata.....	83
B. Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi.....	83
1) Sarana Perkantoran.....	83
2) Sarana Perdagangan.....	84
3) Sarana Pendidikan.....	85
4) Sarana Kesehatan.....	86
5) Sarana Peribadatan.....	87

C. Analisis- analisis Pengembangan Kawasan Pesisir dengan Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan.....	88
1) Analisis Location Quotient.....	88
2) Analisis SWOT.....	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>) (X).....	54
Tabel 3.2 Model Matriks Analisis SWOT	59
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2016..	63
Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Takalar Tahun 2016....	63
Tabel 4.3 Luas Desa Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	69
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	70
Tabel 4.5 Perkembangan Penduduk Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	71
Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	72
Tabel 4.7 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	73
Tabel 4.8 Jumlah Perahu/Motor Tempel di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....	80

Tabel 4.9 Jumlah Alat Tangkap Ikan (unit) Kecamatan Galesong Selatan

Tahun 2018.....81

Tabel 4.10 Luas Area (Ha) Budidaya Ikan di Kecamatan Galesong

Selatan Tahun 2016.....82

Tabel 4.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kecamatan Galesong

Selatan Tahun 2016.....83

Tabel 4.12 Jumlah Nelayan (orang) Menurut Jenisnya di Kecamatan

Galesong Selatan Tahun 2016.....84

Tabel 4.13 Jumlah Produksi Tambak Menurut Jenisnya di Kecamatan

Galesong Selatan Tahun 2016.....85

Tabel 4.14 Jumlah Produksi Ikan di Perairan Umum Menurut

Jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016.....87

Tabel 4.15 Jumlah Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Galesong

Selatan Tahun 2016.....89

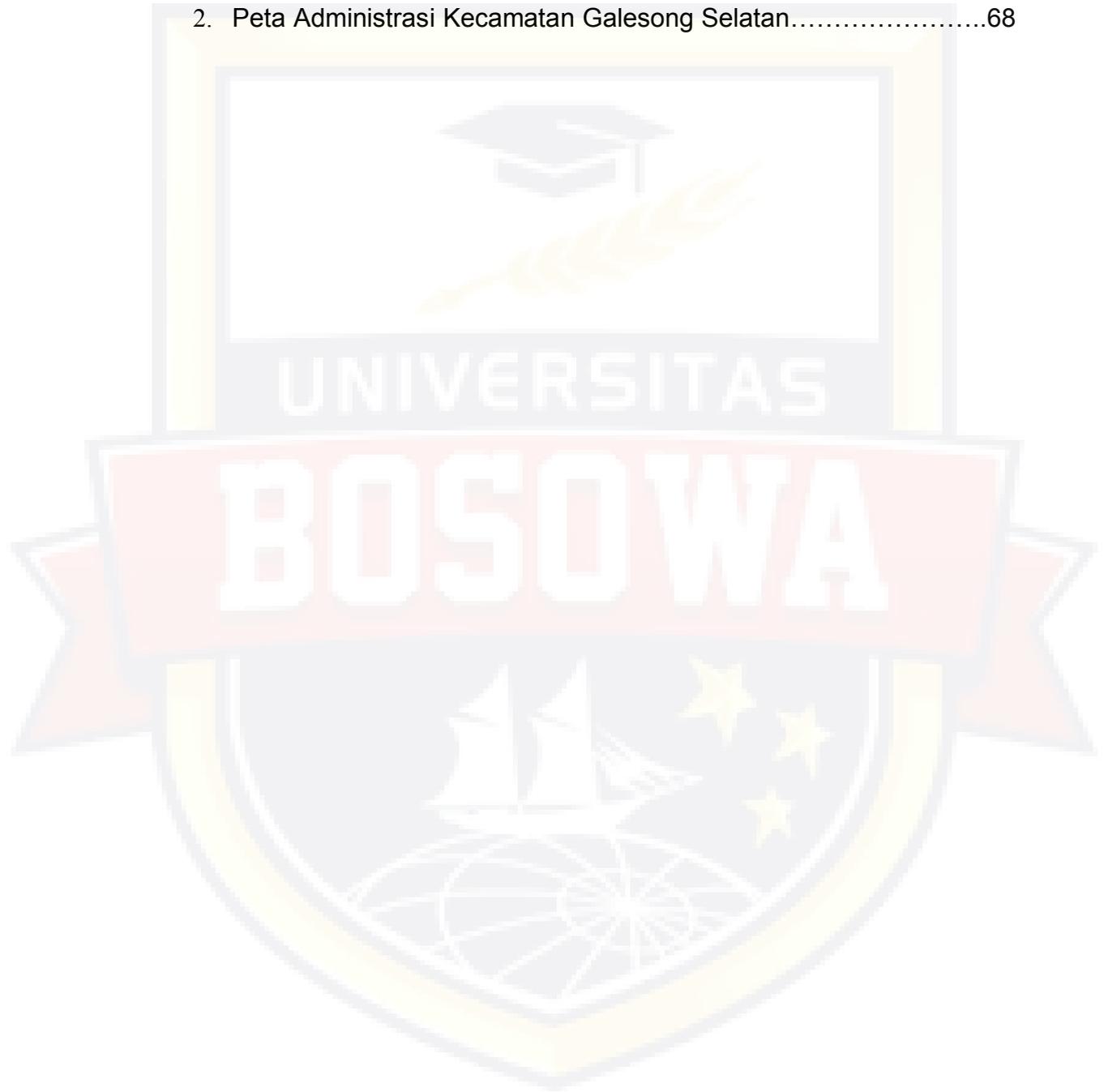
Tabel 4.16 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Galesong Selatan

Tahun 2016.....90

Tabel 4.17 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Galesong Selatan	
Tahun 2016.....	91
Tabel 4.18 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Galesong Selatan	
Tahun 2016.....	92
Tabel 4.19 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun) di Kecamatan	
Galesong Selatan Tahun 2017.....	93
Tabel 4.20 Jumlah Produksi Perikanan (Ton/Tahun) di Kecamatan	
Galesong Selatan Tahun 2017.....	94
Tabel 4.21 Data Produksi di Kecamatan Galesong	
Selatan Tahun 2016.....	95
Tabel 4.22 Perhitungan LQ.....	96
Tabel 4.23 Internal Strategi Factor Analysis (IFAS).....	99
Tabel 4.24 Eksternal Strategi Factor Analysis (EFAS).....	101
Tabel 4.25 Matrix Analisis SWOT Pengembangan Sumberdaya	
Pesisir.....	103

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Administrasi Kabupaten Takalar.....66
2. Peta Administrasi Kecamatan Galesong Selatan.....68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir yang luas dan memiliki sumber daya laut yang melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan di Indonesia yang sangat diharapkan saat ini, di samping sumber daya alam darat. Pesisir merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut, yang wilayahnya dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di darat maupun yang ada di laut.

Berkembangnya globalisasi industri dan perdagangan bebas, telah menyebabkan semakin meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan wilayah pesisir, yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Berbagai aktifitas pembangunan di wilayah pesisir, seperti pemukiman, industri dan perdagangan, kegiatan transportasi maupun pariwisata, secara signifikan memang telah memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan. Namun perkembangan ini juga turut memberikan dampak terhadap kelestarian dan daya dukung

lingkungan maupun perubahan-perubahan terhadap kondisi sosial di wilayah ini yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014, pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di daratan, lautan dan di udara perlu dilakukan secara terkordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kemampuan lingkungan sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Khusus untuk ruang laut dan udara akan diatur dengan aturan lain.

Karena belum adanya aturan yang jelas mengenai pemanfaatan wilayah laut maka untuk itu telah ditetapkan pedoman umum penyusunan rencana tata ruang khususnya pengelolaan pesisir sehingga dikeluarkan Kepmen No. 34 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang selanjutnya mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), akhirnya menuntut praktek pengelolaan yang tepat di tingkat daerah. Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstaksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstaksi dimaksud secara langsung mengurangi kualitas tatanan itu dari ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompenansi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumberdaya pesisir yang tersedia, menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah di daerah tersebut.

Pembangunan di wilayah pesisir dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan yang baru (Jufriadi, 2014)

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia, dengan panjang pantai 1.973,7 km dan luas perairan lautnya kurang lebih 48.000 km², memiliki potensi yang sangat kaya akan berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memijah, dan mencari makan berbagai biota laut.

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) maupun dari aspek social yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat local. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sejalan dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa perencanaan tata ruang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, social budaya, politik, hokum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Sehingga nantinya dengan adanya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi.

Factor factor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir daya dukung lahan, kemampuan lahan, nilai lahan dan proses politik menjadi salah satu hal yang patut digaris bawahi dari referensi perencanaan tata ruang laut pesisir mengingat persoalan-persoalan pengelolaan ruang laut pesisir di Indonesia muncul karena lemahnya political will (kemauan politik) penyelenggara negara dalam mengelola sumberdaya, termasuk didalamnya masalah birokrasi dan korupsi yang menyebabkan pemerintah tidak optimal dalam penataan ruang laut pesisir. Pembangunan pada Kawasan pesisir sering berbenturan dengan kondisi ekologis dan menuai kontroversi menunjukkan masih lemahnya dalam melakukan perencanaan.

Perencanaan tataruang laut pesisir hanya menyangkut aktivitas manusia pada wilayah laut bukan berarti ekosistem dan komponen ekosistem pada wilayah tersebut sehingga perlu kajian mendalam kondisi ekologis sebelum merencanakan suatu pembangunan di wilayah pesisir. Dengan demikian suatu perencanaan tata ruang laut haruslah secara gamblang menjelaskan bagaimana cara mengatur manusianya yaitu semua yang berkepentingan (stakeholder) di wilayah tersebut. Ketika sudah berbicara pada ruang public ini maka proses dan lobi politik untuk menyusun perencanaan tata ruang laut sangat rentan untuk terjadinya tarik menarik kepentingan.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya pesisir yang sangat besar, terletak sepanjang pesisir pantai barat selat Makassar sampai dengan pesisir pantai Selatan Laut Flores dan beribukota di Patallasang. Salah satu kawasan pesisir di Kabupaten Takalar yang memiliki potensi sumberdaya pesisir yang banyak yaitu Kecamatan Galesong Selatan.

Potensi sumberdaya pesisir yang ada sekarang dapat dipertahankan dan dikembangkan seperti hasil produksi perikanan yang hingga saat ini semakin meningkat dan adapun yang tahun ke tahun menurun, seperti produksi jenis ikan lamuru pada tahun 2013 per tonnya 46.18 sedangkan pada tahun 2014 per tonnya 9.20, terlihat hasil produksinya sangat menurun. Adapun jenis ikan lain yang tahun ke tahun meningkat yaitu jenis ikan kerapu (sunu) pada tahun 2013 per tonnya 27.808 sedangkan pada tahun 2014 per tonnya 125 (Kecamatan Galesong Selatan, dalam angka 2016). Kegiatan lain yang dapat dikembangkan adalah pengembangan pariwisata.

Inisiatif pengelolaan kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar membutuhkan respon positif dari setiap aktor utama di setiap lokalitas. Respon yang dimaksud tidak hanya menyangkut kesiapan menerima inisiatif ini tetap kesiapan konstitusional di tingkat lokal, kesiapan masyarakat yang diturunkan dalam bentuk kesiapan aksi bersama dalam hal ini kesiapan di tingkat

komunitas atau masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Tantangan ini semakin nyata di kawasan pesisir dan laut, dimana dituntut keterpaduan pengelolaan untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kabupaten Takalar pada umumnya dan Kecamatan Galesong Selatan pada khususnya, maka di masa yang akan datang menjadi tantangan bagi kawasan tersebut untuk merebut peluang potensi yang ada, sehingga perencanaan penataan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil perlu diarahkan secara terpadu guna mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh. Sesuai dengan itu, maka diperlukan arahan penataan ruang untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam pesisir Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong Selatan dengan menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya perikanan sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang melatar belakangi penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar**”, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan mengembangkan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah,

1. Bagaimana kondisi sumberdaya pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana strategi perkembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kondisi sumberdaya pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
 - b. Untuk mengetahui perkembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

2. Manfaat

- a. Untuk memberikan informasi tentang kondisi sumber daya pesisir di kawasan pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sumberdaya pesisir di kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Adapun lingkup bahasan materinya yaitu identifikasi kondisi sumber daya pesisir dan mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan rangkaian penyusunan penulisan pada penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat mudah mengetahui bagian-bagian penulisan. Adapun sistematika penulisannya yaitu,

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta ruang lingkup, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat literatur yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penulisan yang selanjutnya digunakan dalam melakukan analisa-analisa pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, variable penelitian, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Takalar, dan Kecamatan Galesong Selatan sebagai wilayah penelitian, tahapan analisis diantaranya Analisis Skalogram dan Analisis SWOT.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diambil melalui hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan wilayah adalah upaya pemanfaatan sumberdaya wilayah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya wilayah memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Pengembangan wilayah yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif akan berakibat pada menurunnya kemampuan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, yang pada akhirnya sangat merugikan sistem wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, sumber daya wilayah senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (Lutfi Muta'ali, 2012).

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat di kelola secara berkelanjutan. Hal tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan baru. Sumberdaya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan

dapat dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional (Jufriadi, 2014).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstaksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstaksi dimaksud secara langsung mengurangi kualitas tatanan itu dari ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompensasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Akses untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya jika tidak diatur dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak terhadap kelestarian dan keberlanjutan akan menimbulkan dampak eksploitasi terhadap sumberdaya. Dalam beberapa kasus, sumberdaya pesisir seringkali mendapat beban yang sangat berat, selain karena posisinya yang berada didaerah hilir, juga struktur wilayahnya yang sangat terbuka dan selama ini tidak mendapat prioritas pembangunan akibat paradigma pembangunan yang sangat sektoral.(Bengen, 2009).

A. Pengertian Wilayah Pesisir

Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz 1972; Soegiarto 1976 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil, 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ditegaskan bahwa Perairan pesisir dan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna. (Beatly 1994 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil 2003). Dahuri et al. (1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan dimana ke arah darat adalah jarak secara arbiter dan rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah

propinsi atau state di suatu Negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Menurut Dahuri et al. (1996), dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir di batasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, kearah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan lain-lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, kearah laut daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relative tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relative rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar (2004), dinyatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrien (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi perusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*).

B. Karakteristik Wilayah Pesisir

Merupakan wilayah percampuran pengaruh antara laut, darat, dan udara; bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut. Hal ini terlihat dari adanya gradasi butiran sedimen sebagai hasil pengikisan batuan padat dan keras oleh unsur alam.

Wilayah pesisir berfungsi sebagai zona penyangga (*buffer zone*) dan merupakan habitat dari berbagai jenis burung migran, serta habitat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut. (*natural coastal defence*).

- Terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa (*goods and services*) bagi komunitas pesisir dan pemanfaat lainnya (*beneficiaries*)
- Adanya kompetisi antara berbagai kepentingan
- Sebagai backbone dari kegiatan ekonomi nasional
- Merupakan wilayah strategis, didasarkan atas fakta:
 - ✓ Garis pantai Indonesia 81.000 km pada 17.508 pulau (terbanyak di dunia)
 - ✓ Penyebaran penduduk terbesar (cikal bakal urbanisasi)
 - ✓ Potensi sumberdaya kelautan yang kaya (biodiversity, pertambangan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dsb)

- ✓ Sumberdaya masa depan (*future resources*) akibat ketersediaan wilayah darat yang semakin terbatas
- ✓ Wilayah hankam (perbatasan)

C. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Sumberdaya pesisir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik sebagai sumber pangan, penghasilan, obyek wisata, media dan transportasi. Secara umum potensi sumberdaya wilayah pesisir dibedakan menjadi 3 kategori yaitu sumberdaya hayati, non-hayati dan jasa kelautan. Sumberdaya hayati meliputi perikanan, mangrove, padang lamun, terumbu karang dan semua jenis biota laut. Potensi sumberdaya pesisir relatif kaya namun sebagian besar penduduk pesisir relatif miskin. Kemiskinan dan ketidakpedulian memicu tekanan terhadap sumberdaya pesisir yang menjadi sumber penghidupannya dan apabila tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir.

Peluang pembangunan sektor kelautan dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah pesisir pada masa mendatang cukup cerah. Hal ini terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dalam dan luar negeri. Permintaan pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga komoditi substitusi, selera, mutu, dan citra dari produk kelautan yang dipasarkan.

D. Pengembangan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkotaan sebagai intinya, bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (output) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir juga dapat berupa wilayah yang relative kecil kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh ekologis sehingga melewati batas-batas satuan wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan). Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak

menutup kemungkinan adalah lintas batas administratif (Budiharsono, 2001)

Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh nilai lokasi (*locational rent*), setidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni: *ricardian rent*, *environmental rent*, dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan-kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Dalam mekanisme pasar umumnya, hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) basis ekonomi wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaru, (2) memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) efek ganda yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian dan (5) terjadinya secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan (Rustiadi *et al.* 2004)

Berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat (Dahuri *at al.* 2001) yaitu: (1) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologis paling produktif di dunia; berbagai ekosistem dengan produktifitas hayati tertinggi, seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuaria, berada di wilayah pesisir, lebih dari 90%

total produksi perikanan dunia (sekitar 82 juta ton) baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya, berasal dari wilayah pesisir, (2) wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan yang paling praktis dan relatif lebih murah bagi kegiatan industri, permukiman, dan kegiatan pembangunan lainnya, daripada yang dapat disediakan oleh daerah lahan atas, kemudahan tersebut berupa media transportasi, tempat pembuangan limbah, bahan baku air pendingin dari air laut untuk berbagai jenis pabrik dan pembangkit tenaga listrik, dan bahan baku industri lainnya; (3) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan menguntungkan, seperti pasir putih atau pasir bersih untuk berjemur, perairan pesisir untuk renang, selancar, dan berperahu, dan terumbu karang serta keindahan bawah laut untuk pariwisata selam dan *snorkeling*.

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antar daerah/regional. Tujuan pembangunan wilayah juga harus mampu mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antar sektor pertanian dan industri melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (Todaro, 2000). Di samping itu pembangunan wilayah bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakat guna

mencapai aspirasinya. Penciptaan alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi ekonomi dan struktural melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, memperkecil disparitas pendapatan, perubahan struktural distribusi kekuasaan antar golongan masyarakat ke arah yang lebih adil, serta transformasi kultural dan tata nilai. Perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat (Nasoetion, 1999).

Pengelolaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya alam yang baik dapat memberikan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik berdampak buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana mengelola sumberdaya alam tersebut di dalam suatu wilayah untuk dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya alam. Tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir adalah, (1) pendayagunaan potensi pesisir dan lautan, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pengelolaan dan pengembangan pesisir dan dapat bermanfaat bagi perekonomian daerah, (2) adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan ekosistem

wilayah pesisir dalam mendukung kelestarian sumberdaya pesisirnya dan lautan khususnya. Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di wilayah pesisir untuk bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

E. Pendekatan-pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir

Banyak yang berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/ instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akan dapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai enstitusi/lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai arahan bagi pengembangan,

strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi.

Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung dari kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi : (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan fungsional/ ekonomi; (3) pendekatan sosio-politik; (4) pendekatan behavioral dan kultural. Pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada aspek “penguasaan” wilayah. Pendekatan ini melihat wilayah tidak saja dilihat dari berbagai sarana produksi namun juga sebagai sarana untuk mengakumulasikan power. Konflik-konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-satuan organisasi tertentu. Pendekatan behavioral dan kultural, menekankan pada keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau memanfaatkan ruang

wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pendekatan ini melihat aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda.

Disamping pendekatan-pendekatan yang bersifat substansial seperti diatas, terdapat beberapa pendekatan yang bersifat instrumental. Pendekatan instrumental ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu (1) instrumen hukum dan peraturan; (2) instrumen ekonomi; (3) instrumen program dan proyek; dan (4) instrumen alternatif.

Instrumen hukum dan peraturan mempunyai konsep atau ide dasar adanya hukum dan peraturan beserta penegakannya. Instrumen ini antara lain berupa hukum dan peraturan-peraturan seperti ijin lokasi, ijin bangunan, AMDAL dan sebagainya. Instrumen ekonomi mempunyai konsep atau ide dasar adanya pengaruh ekonomi pasar yang sangat signifikan terhadap pengembangan wilayah. Contoh dari penerapan instrumen ini adalah adanya penerapan pajak, retribusi serta insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Instrumen program dan proyek khususnya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah didasari atas konsep atau ide dasar pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat luas. Penerapan instrumen ini seperti pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan sejenisnya. Instrumen alternatif berdasarkan konsep atau ide dasar adanya pemberdayaan

masyarakat dari kemitraan. Contoh-contoh dari penerapan instrumen ini antara lain meliputi pelatihan, pendidikan, partisipasi masyarakat, adanya proyek-proyek percontohan, penghargaan kepada pelaku masyarakat dan swasta atau pelaku pembangunan lainnya

F. Potensi Sumberdaya Pesisir

Kawasan pesisir di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat pulih (*renewable*) maupun yang tidak dapat pulih (*unrenewable*). Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta di dukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pengembangan wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*Interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir (Dahuri et al 2001), potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (1) Sumberdaya yang dapat pulih

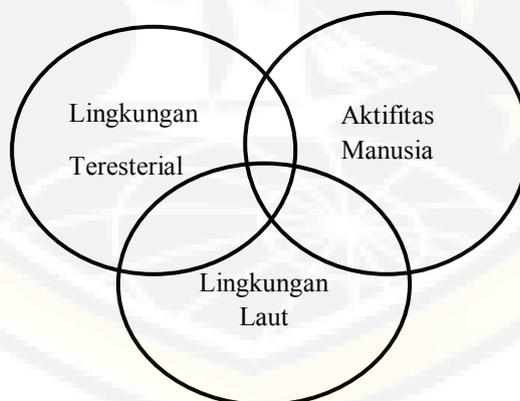
(*renewable resources*), (2) Sumberdaya tidak dapat pulih (*unrenewable resources*), (3) Energi lautan dan (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*ocean thermal energy conversion*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi 12 (dua belas) mil yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil juga menjelaskan secara tegas tentang pengertian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yakni sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, Padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan

kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

G. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Secara geografis wilayah pesisir terbentuk dari pertemuan antara daratan dan lautan dimana di dalamnya terjadi proses-proses fisik dan biologi yang kompleks. Secara ekologis wilayah pesisir terdiri atas sejumlah habitat daratan dan perairan yang rentan, dengan ekosistem pesisir yang unik, yang memiliki sumberdaya alam yang berharga. Ekosistem ini juga sangat terkait dengan sistem sosial ekonomi yang membentuk sistem sumberdaya (Scura, 1992).



Gambar 2.1

Hubungan antara Wilayah Pesisir dan Sistem Sumberdaya Pesisir
(Scura, 1992).

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sistem sumberdaya dapat dikonseptualisasikan sebagai cakupan interaksi antara biofisik, lingkungan teresterial dan laut serta aktifitas manusia, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga perencana. Daerah arsiran pada gambaran menunjukkan wilayah pesisir sedangkan daerah bayangan merupakan sistem sumberdaya pesisir. Dengan demikian segenap aktifitas manusia yang dipahami sebagai kegiatan pembangunan ekonomi, merupakan suatu elemen penting dan telah turut memberikan kontribusi di dalam suatu sistem sumberdaya dalam hal ini yang terdapat di wilayah pesisir.

Pembangunan adalah suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia (Bryant dan White, 1982). Istilah “pembangunan” sering di sama artikan dengan “pengembangan” yang dalam bahasa asing juga dapat diistilahkan dengan *development*. (Djojohadikusumo, 1994) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi (*development*) mengandung arti yang lebih luas dibanding pengertian pada pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan

ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Nasoetion (1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan dimana terdida lebih banyak alternative yang syah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling *humanistic* yaitu tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya Winoto (1995) mengemukakan bahwa setiap proses pembangunan senantiasa diikuti oleh proses transformasi perekonomian, ketenaga kerjaan, demografim sosial dan budaya masyarakat, wilayah atau negara. Sedangkan ciri proses pembangunan menurut Djohadukusumo (1994) adalah peningkatan produksi, perubahan komposisi produksi, perubahan pola alokasi sumberdaya produksi, perubahan dalam pola distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal yang penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan dimana terjadinya proses transformasi dan perubahan struktural selama ini selalu menempatkan dimensi ekonomi sebagai pertimbangan yang dominan. Sebaliknya, walaupun sudah masuk perhitungan, faktor lingkungan masih dianggap sebagai pengambat pembangunan. Kenyataan ini

memperlihatkan bahwa pembangunan dan lingkungan adalah dua hal yang saling berlawanan. Sehingga dalam perkembangannya dalam mengatasi permasalahan ini, pola pembangunan berkelanjutan telah semakin banyak diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan yang konvensional tersebut (Salim, 1991). Semakin banyak orang merasa pola pembangunan yang konvensional yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja telah melampaui batas kegunaannya dan bahkan sekarang menjurus ke arah yang merugikan manusia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam pesisir yang besar dan masih terdapat yang belum dimanfaatkan (*underutilized*). Pesatnya pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumberdaya pesisir akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Namun ironisnya kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya masih termasuk kategori miskin. Fenomena ini hanya dapat diselesaikan dengan jalan membangun wilayah pesisir dan lautan secara optimal, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sekaligus dapat meningkat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan kata lain, pembangunan wilayah pesisir dilakukan tanpa meninggalkan pertimbangan terhadap keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat

sekitar (*human specific*). Keadaan ini telah mendorong kita akan kebutuhan untuk konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Dahuri, 1998).

Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus pula mengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang (WCED, 1987). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Dahuri (1996) menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai strategi pemanfaatan ekosistem alamiah rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia tidak rusak.

Secara ekologis terhadap tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) keharmonisan spasial (*special suitability*), (2) kapasitas asimilasi (*assimilative capacity*), dan (3) pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, tidak seluruhnya diperuntukan bagi zona pemanfaatan, yang sangat penting dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan unsur hara,

membersihkan limbah secara alamiah maupun sebagai sumber keanekaragaman hayati. Selanjutnya setiap aktifitas pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai (Dahuri et al, 1996).

Pola pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, namun juga mengembangkan keberlanjutan sosial (*social sustainability*) yang berkaitan erat dengan ketahanan sosial (*social resilience*). Dalam masyarakat terdapat ambang batas sosial, di atas ambang tersebut maka masyarakat meletup. Hal ini bisa terjadi apabila proses pembangunan tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pembangunan, sehingga tertutup kesempatan meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan pendidikan, kesempatan yang terbuka (*ready access*) memperoleh sumberdaya seperti tanah, lapangan kerja, modal, kredit, pendapatan dan yang serupa (Salim, 1991). Dari pengalaman yang diperoleh, letupan sosial terjadi apabila hasil pembangunan terbagi timpang sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Dalam perkembangan ambang batas sosial atau yang lebih sering dikatakan sebagai daya tampung sosial (*social Carrying Capability*) menurut Hadi (1998) dikatakan sebagai kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama

dalam suatu masyarakat secara harmonis. Daya tumpahh sosial ini dapat diukur melalui beberapa indikator baik secara kualitatif maupun kuantitatif, antara lain seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kuantitas penduduk, kohesi sosial, peran serta atau keterlibatan masyarakat dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai suatu konsep, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Untuk mewujudkan konsep ini dalam realitas kehidupan dibutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar mengenai cara-cara kita melakukan pembangunan, hidup berkonsumsi dan saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bernegara serta cara-cara kita saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama serta memanfaatkan sumberdaya yang memiliki (Steven dalam Winoto, 1998).

Dahuri et al, (1996) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sabaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif, seperti terjadinya penurunan nilai-nilai sumberdaya pesisir dan lautan yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu sendiri. Keadaan ini disebabkan antara lain penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan daya dukungnya, tidak disertainya

dengan usaha-usaha konservasi pembangunan yang telah direncanakan penataannya.

Berdasarkan karakteristiknya, potensi dan permasalahan yang ada, maka untuk mencapai pemanfaatan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan telah mendorong untuk dilakukannya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Menurut Olsen, et al (1997) maupun Cicin-Sain dan Knecht (1998) secara umum pengelolaan pesisir terpadu dapat didefinisikan sebagai suatu proses dinamis dan terus menerus memadukan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, kepentingan publik dan sektoral dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk pembangunan dan perlindungan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Sedangkan tujuan dari pengelolaan pesisir terpadu sebagaimana dinyatakan Burbridge (1997) adalah untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas manusia yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya pesisir disamping memelihara keanekaragaman biologi dan produktivitas ekosistem pesisir. Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelas lagi Cicin-Sain dan Knecht, (1998) juga mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan, mengurangi kerentanan wilayah pesisir dan masyarakatnya dari bahaya

alami, dan untuk menjaga proses-proses ekologis esensial, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir.

H. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan

1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (*dekratisasi*), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

Dengan latar belakang pemikiran diatas akan muncul model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development* yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial (Harris et al, 2001 dalam Dahuri, 2003). Suatu pembangunan kawasan pesisir, pertama secara ekonomi dianggap berkelanjutan (*economic growth*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; kedua secara ekologis dianggap berkelanjutan (*ecological sustainability*) manakala basis ketersediaan sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai, dan ketiga secara sosial dianggap berkelanjutan (*social equity*) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil. Menurut Bengen (2004) pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis: (1) pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya; (2) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang harmonis; dan

(3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan.

2. Isu-isu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Dalam panduan Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat tahun 2003 menjelaskan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki potensi yang sangat besar, baik hayati maupun non hayati. Namun hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih jauh dari optimal dan berkelanjutan. Bahkan, karena tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang masih jauh dari yang diharapkan, banyak sumberdaya pesisir tersebut dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab, dicuri, hingga mengalami degradasi. Ada banyak faktor penyebab terjadinya degradasi sumberdaya wilayah pesisir yang pada akhirnya mengakibatkan potensi yang ada didalamnya tidak dapat memberikan manfaat lestari bagi kelanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah garis besar isu-isu umum yang ditemukan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

a) Isu Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aktor atau penggerak utama dalam proses-proses pengelolaan sumberdaya pesisir. Harmonisasi dan konsistensi visi, strategi, dan tujuan-tujuan

pembangunan antarlevel dan lembaga pemerintahan sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap lembaga secara umum mempunyai mandat, aturan, tujuan, dan kebijakan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan upaya-upaya pengelolaan mengalami hambatan. Isu-isu kelembagaan yang umum dalam pengelolaan pesisir antara lain:

- Rendahnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan berkelanjutan
- Kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia
- Konflik dan tumpang tindih peraturan antarlembaga dan tingkatan pemerintahan
- Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir
- Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada
- Pengelolaan tradisional yang kurang mendapat perhatian pemerintah sehingga sering bertentangan dengan undang-undang dan pengelolaan modern.

Dalam hal pengelolaan tradisional, perlu dipahami bahwa tidak semua praktik pengelolaan tradisional digolongkan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada berbagai kegiatan

pengelolaan secara tradisional yang sifatnya merusak (destruktif), seperti adanya sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan bahan peledak, penangkapan dengan sistem "paka-paka" dengan cara berjalan di atas karang dan menakut-nakuti ikan (soma paka-paka), penangkapan dengan menggunakan igi atau bubu yang merusak karang, dan pembuatan perangkap dengan membuat kolam dari karang di atas hamparan terumbu karang, adalah berbagai contoh cara penangkapan atau pengelolaan tradisional yang sifatnya destruktif.

b) Isu Sosial

Perkembangan penduduk yang cukup pesat di wilayah pesisir dan masalah kemiskinan adalah isu-isu sosial yang dominan ditemukan di wilayah pesisir. Isu-isu sosial ini jika tidak ditangani akan memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya pesisir. Isu-isu umum yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah pesisir
- Kemiskinan yang terkonsentrasi di desa-desa pesisir
- Hilangnya akses oleh masyarakat pengguna sumber daya pesisir

- Pengetahuan terhadap nilai sumberdaya pesisir yang masih rendah
- Sanitasi dan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir yang masih rendah
- Meningkatnya konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir

c) Isu Bio-fisik Lingkungan

Laju degradasi lingkungan di wilayah pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas manusia dan oleh alam. Ekosistem terumbu karang, termasuk kekayaan keanekaragaman ikan dan invertebrata, telah mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai tempat sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan cara-cara merusak seperti penggunaan bom, racun sianida, dan pukat harimau. Termasuk pula akibat kegiatan non perikanan lainnya seperti penambangan karang, reklamasi pantai, polusi dari darat, dan sedimentasi. Isu-isu spesifik yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Menurunnya kualitas air akibat polusi
- Menurunnya ikan-ikan yang hidupnya tergantung pada daerah pesisir (lahan basah/wetland, rawa, dan lain-lain) akibat penangkapan yang berlebihan

- Pengrusakan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan pantai akibat penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan, penambangan karang, dan reklamasi pantai
- Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang
- Banjir dan badai laut

Melihat potensi dan ancaman terhadap ekosistem dan sumberdaya wilayah pesisir tersebut, maka suatu upaya pengelolaan mutlak diperlukan.

3. Tujuan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu diwujudkan untuk menggunakan, menikmati, membangun, merawat, mengkonservasi dan melindungi sumberdaya alamnya. Dalam Kep.10/Men/2002, Rencana Pengelolaan telah didefinisikan sebagai beberapa kegiatan normatif yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam suatu zona, mulai dari sistimatik pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan strategi pada penciptaan kegiatan khususnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Definisi ini perlu peninjauan kembali jika dibandingkan dengan hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu. (Bappeda Sulteng, 2005)

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses iteratif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZPM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (*stakeholders*), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZPM adalah keterpaduan (*integration*) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada : (1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (*ekohidrologis*) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola; (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa lingkungan pesisir. (Bappeda Sulteng, 2005)

Fungsi-fungsi Pengelolaan dalam konsep ICZPM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam sektor publik, hal ini adalah tanggung jawab instansi pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir harus membentuk kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab yang diperlukan untuk

mendukung pembuatan keputusan oleh administrator sektoral dalam pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian sumberdaya secara tepat. Dalam kegiatan pengelolaan diperlukan untuk mengidentifikasi pejabat yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, struktur dan komposisi badan/panitia pengelolaan. Diperlukan juga sistem terkoordinasi untuk mengeluarkan dan mengadministrasikan izin penggunaan sumberdaya oleh dinas-dinas teknis. (Bappeda Sulteng, 2005)

Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu: Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir, Terkendalnya reklamasi pantai, Terkendalnya pencemaran perairan, Tertatanya permukiman kumuh, Kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove, Terkendalnya masalah banjir dan abrasi serta sedimentasi. (Syaiful Arifin, 2014)

Salah satu faktor penyubur terjadinya konflik serta mempercepat kerusakan sumberdaya pesisir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi kondisi tersebut harus dilakukan

peningkatan koordinasi kelembagaan yang melibatkan dinas/instansi daerah seperti Bappeda/Bappeko, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Perhubungan dan kepelabuhan, BPN, dan lain-lain. Upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan ego sektor dengan penegasan kembali fungsi dan kewenangan masing-masing dinas/instansi terkait, serta harus ada selalu diadakan rapat-rapat koordinasi untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri. (Syaiful Arifin, 2014)

Di samping kelembagaan pemerintah, peran kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, serta dunia usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan, utamanya pada tataran perencanaan dan monitoring/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. (Syaiful Arifin, 2014).

4. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada

umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir. (Neni Nurani, 2008)

5. Prinsip Dasar (asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir terpadu

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang berasaskan:

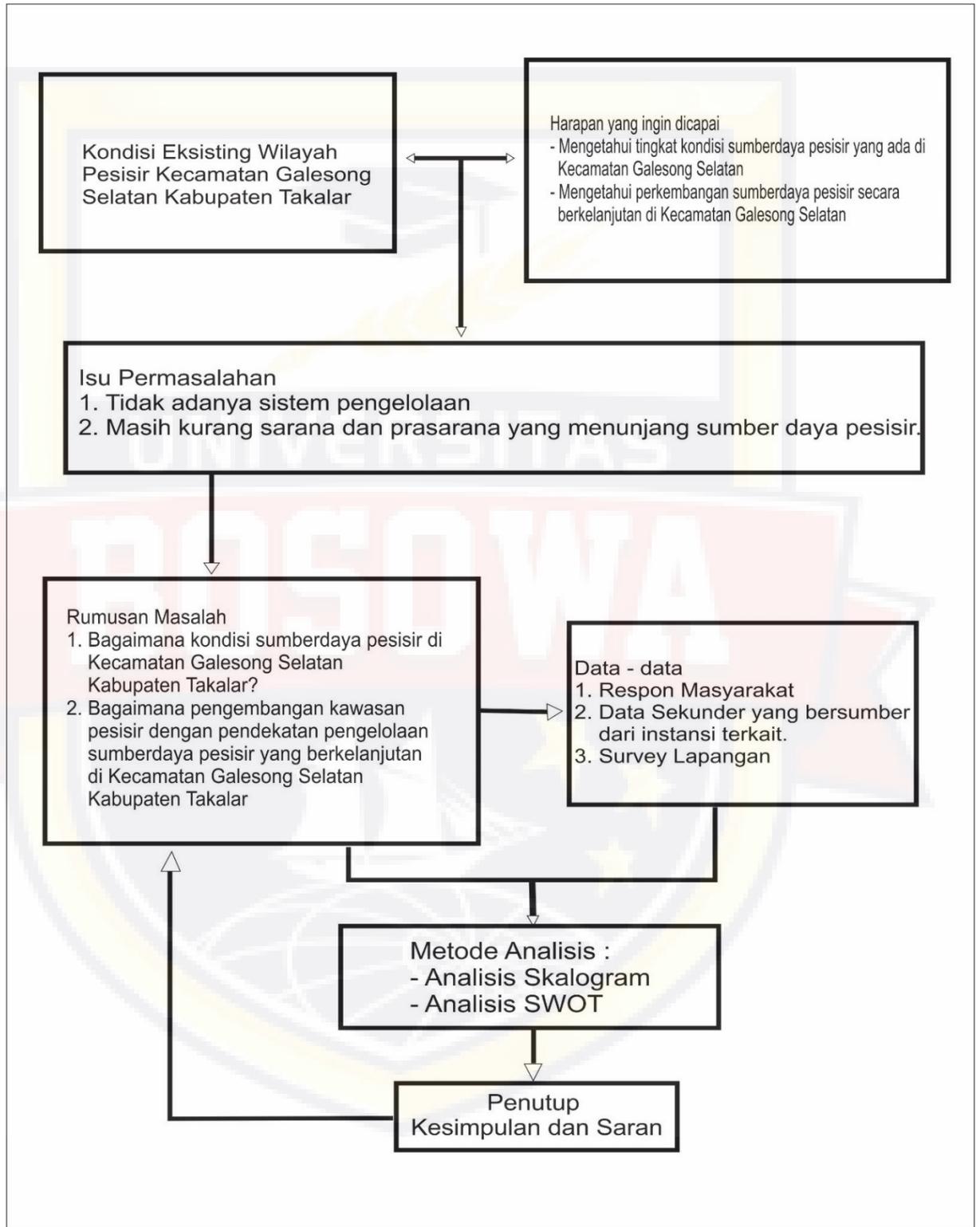
- Keterpaduan
- Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- Berkelanjutan
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- Keterbukaan
- Keersamaan dan Kemitraan
- Perlindungan Kepentingan Umum
- Kepastian hukum dan keadilan
- Akuntabilitas

Penataan ruang dilakukan secara terpadu, dan yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan

serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Penataan ruang harus berdaya guna dan berhasil guna dimana harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Kemudian, serasi, selaras, dan seimbang dengan maksud bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan wilayah. Kemudian, penataan ruang berasaskan berkelanjutan yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

I. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif-kuantitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Adapun penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data-data substansi atau angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. Kedua metode tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian mengenai pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan Kecamatan Galesong Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong Selatan yang terdiri dari 12 desa, diantaranya 4 desa wilayah pesisir.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 hingga selesai pada bulan September 2018, untuk pengambilan data selama jangka waktu 1 bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu,

1. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif objek studi. Jenis data yang dimaksud meliputi :
 - a. Kondisi fisik wilayah pesisir
 - b. Prasarana dan sarana
 - c. Hidro-oceanografi
 - d. Pola penggunaan lahan
 - e. Ekosistem pesisir
2. Data sekunder dengan observasi pada instansi terkait dengan yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang dimaksud meliputi :
 - a. Geografi wilayah/administrasi;
 - b. Demografi;

c. Fasilitas/Utilitas Kawasan;

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni,

1. Observasi

Metode ini merupakan survey atau pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti kondisi lingkungan, karakteristik, sosial budaya, sosial dan ekonomi setempat dan dokumentasi visual lokasi penelitian.

2. Kuesioner,

Digunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diberikan kepada masyarakat di lokasi penelitian (*responden*).

3. Wawancara,

Wawancara dalam hal ini digunakan untuk mencari informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancara ini ditujukan kepada beberapa sumber yang mengetahui secara mendalam dengan permasalahan penelitian, seperti masyarakat setempat, instansi terkait yang berada di lokasi penelitian.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dan informasi dengan jalan membaca atau mengambil literatur, laporan, seminar, foto dan sebagainya.

F. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan sebagai ciri dari individu, objek, gejala, yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu variabel terikat (*Dependent Variable*) dan variabel bebas (*Independent Variable*).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) (Y)

Kondisi Sumberdaya Wilayah Pesisir Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*) (X)

Tabel 3.1

Variabel Bebas (*Independent Variable*) (X)

No	Variabel	Indikator
1	Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Penyerapan tenaga kerja- Tersedianya akses pelayanan- Kesenjangan kesempatan kerja
2	Aspek ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pendapatan masyarakat,- Peluang usaha- Sektor informal- Kesenjangan pendapatan- PDRB dari sektor: angkutan dan komunikasi, keuangan, jasa-jasa, pertanian, industry, listrik, gas dan air, kontruksi dan perdagangan.
3	Aspek lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Konservasi lingkungan.- Pencemaran lingkungan.- Keamanan dan kenyamanan

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Dimana :

Si = Jumlah buruh sektor kegiatan ekonomi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki

N_i = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas
Itu jika menggunakan data buruh atau tenaga kerja. Demikian pula jika menggunakan data lain, seperti PDRB.

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

- a) Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- b) Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan
- c) Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Asumsi metoda LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya adalah permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

2. Analisis SWOT

Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang pengembangan sumberdaya pesisir di Kecamatan Galesong Selatan dapat diketahui menggunakan analisis SWOT yang merupakan suatu alat efektif dalam membantu menstruktur masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*).

Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang antara lain:

3. Kekuatan (*Strengths*) adalah faktor internal sebagai pendorong untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
4. Kelemahan (*Weaknesses*) adalah mengidentifikasi faktor internal yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

5. Peluang (*Opportunities*) adalah faktor eksternal yang mendukung untuk mencapai pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
6. Ancaman (*Threats*) adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

Tabel 3.2
Model Matriks Analisis SWOT

	Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Eksternal			
Peluang (O)		Strategis (SO) (strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)	Strategis (WO) (strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
Ancaman (T)		Strategis (ST) (strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	Strategis (Wt) (strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari kelemahan)

Sumber: Feddy Rangkuti, 2001

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Definisi tersebut adalah:

1. Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu sadar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras.
2. Berkelanjutan adalah suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus pula mengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang.
3. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, social, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,

pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
7. Rehabilitas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan dan dibagian pesisir barat Sulawesi Selatan.

Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi $5^{\circ}3'$ – $5^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22'$ – $119^{\circ}39'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih $566,51 \text{ Km}^2$.

Secara administrasi Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan, dan 6 diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)	Wilayah Pesisir atau Daratan
1	Mangarabombang	100,5	17,74	Pesisir
2	Mappakasunggu	45,27	7,99	Pesisir
3	Sanrobone	29,36	5,18	Pesisir
4	Polombangkeng Selatan	88,07	5,55	Daratan
5	Pattallassang	25,31	4,47	Daratan
6	Polombangkeng Utara	212,25	37,47	Daratan
7	Galesong Selatan	24,71	4,36	Pesisir
8	Galesong	25,93	4,58	Pesisir
9	Galesong Utara	15,11	2,67	Pesisir
Luas Wilayah Kab. Takalar		566,51	100	-
Luas Wilayah Pesisir/Pulau		240,88	42,52	-

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2017

Tabel 4.2
Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2016

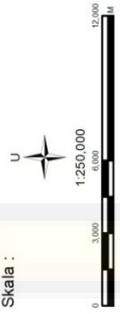
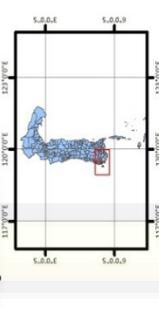
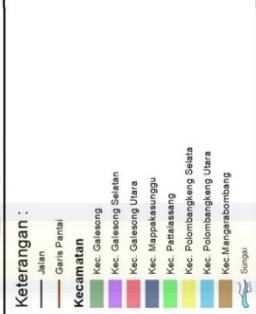
No	Kecamatan	Ibukota	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Mangarabombang	Mangadu	11	1	12
2	Mappakasunggu	Cilallang	8	1	9
3	Sanrobone	Sanrobone	6	-	6
4	Polombangkeng Selatan	Bulukunyi	4	6	10
5	Pattallassang	Pattallassang	-	9	9
6	Polombangkeng Utara	Palleko	12	6	18
7	Galesong Selatan	Bonto Kassi	12	-	12
8	Galesong	Galesong Kota	14	-	14
9	Galesong Utara	Bonto Lebang	9	1	10
Banyak Desa/Kelurahan			76	24	100

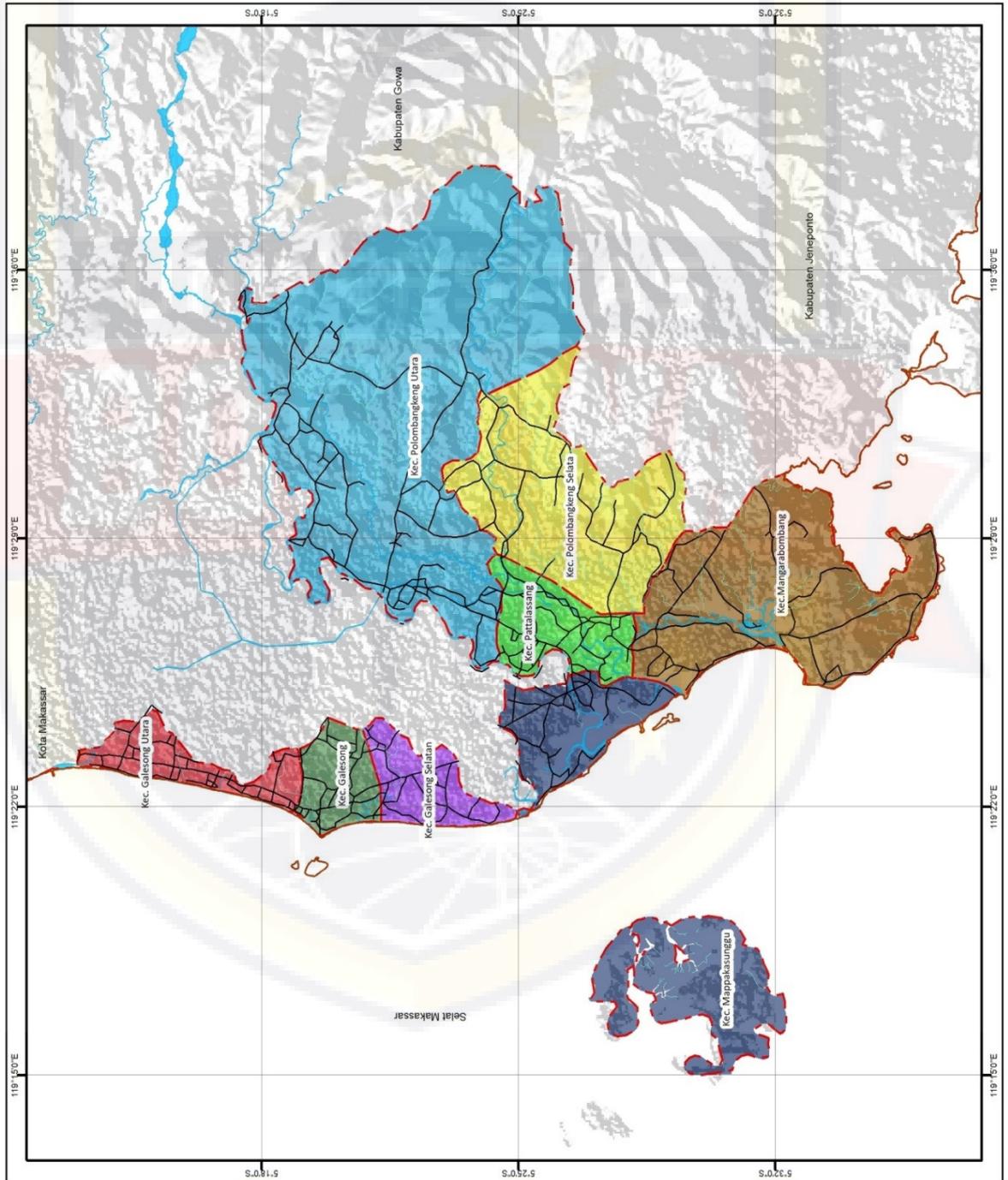
Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2017

Wilayah pesisir dan pulau Kabupaten Takalar yang mencakup 6 (enam) wilayah administrasi kecamatan dengan luas wilayah pesisir dan pulau adalah 240,88 Km² atau 42,52%

dari luas wilayah Kabupaten Takalar. Kawasan pesisir dan pulau membentang dari arah utara ke selatan dengan panjang garis pantai 74 km dan luas perairan laut menurut kewenangannya adalah 1.120 km² skala 4 mil dari batas pantai terluas.

Kawasan pesisir dan pulau di Kabupaten Takalar yang termasuk dalam wilayah pengembangan metropolitan Mamminasata merupakan peluang untuk berkembangnya usaha-usaha produktif yang berbasis pada potensi ruang masing-masing wilayah. Hal ini akan mempengaruhi distribusi dan kepadatan penduduk pada kawasan pesisir akan relatif berkembang karena kemudahan jangkauan terhadap Kota Makassar sebagai core pengembangan kawasan Mamminasata. Kawasan pesisir tersebut yang berbatasan dengan Kota Makassar adalah Kecamatan Galesong Utara yang dihubungkan dengan jaringan jalan alternatif yang berkembang menjadi koridor penghubung potensial yang mendorong pemanfaatan ruang pesisir ke arah intensif.

Judul Skripsi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
Judul Peta : PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TAKALAR
Skala :  1:250,000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 50 S
Diagram Lokasi : 
Keterangan : 
Mahasiswa / Stambuk : ANDI NURUL ILLMI / 45 14 042 030
Pembimbing : 1. Ir. Hj. Rahmawati Rachman, M.Si 2. Ir. Jufriadi, ST, MSP
Sumber : - PETA RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2014 - 2019 - PETA RBI SKALA 1 : 25 000 - Hasil Survey Lapangan Tahun 2018
 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BINA MAKASSAR 2018



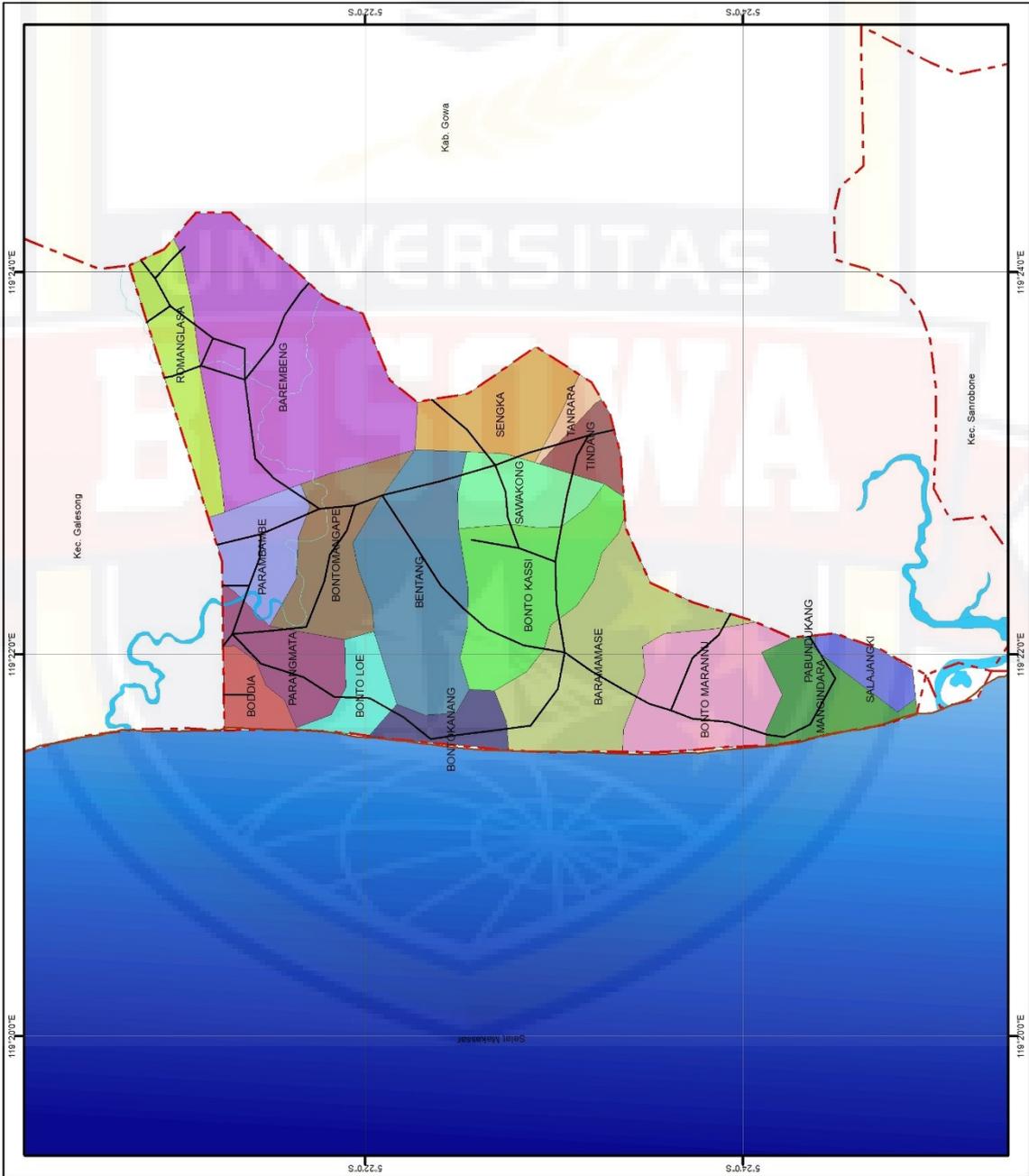
2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Galesong Selatan.

a. Letak Geografis

Kecamatan Galesong Selatan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Takalar dengan luas wilayah sekitar 24,71 km² atau sebesar 4,36 persen dari total Kabupaten Takalar.

Kecamatan Galesong ini merupakan kecamatan yang baru pemekaran sejak tahun 2012, sehingga secara administrasi Kecamatan Galesong Selatan terdiri dari 12 desa, 51 dusun dan 5 diantaranya wilayah pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanrobone dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar



Judul Skripsi :
 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Judul Peta :
 Peta Administrasi Kecamatan Galesong Selatan

Skala :
 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 datum Horizontal : WGS 84 - Zone 50 S

Diagram Lokasi :
 Kecamatan Galesong Selatan

Keterangan :
 Batas Kecamatan
 - Batas Kecamatan
 - Garis Pantai
 - Jalan
 - Desa

■ BONTOMANGAPE
 ■ MANGINDARA
 ■ PARANGMANG
 ■ PARANGMATA
 ■ ROMANGLASA
 ■ SALAJANGKI
 ■ SAWAKONG
 ■ SENGKA
 ■ TANRARA
 ■ TINDANG
 ■ BARAMAMASE
 ■ BAREMBENG
 ■ BENTANG
 ■ BODDIA
 ■ BONTOKASSI
 ■ BONTOLOE
 ■ BONTOMARANNI
 ■ BONTOKANANG
 ■ SENGKA
 ■ TANRARA
 ■ TINDANG

Mahasiswa / Stambuk :
 ANDI NURUL ILMI / 45 14 042 030

Pembimbing :
 1. Ir. Hj. Rahmawati Rachman, M.Si
 2. Ir. Jufriadi, ST, MSP

Sumber :
 - PETA RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2014 - 2019
 - PETA RBI SKALA 1 : 25.000
 - Hasil Survey Lapangan tahun 2018


 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
 2018

Tabel 4.3
Luas Desa di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Wilayah Pesisir atau Daratan
1	Mangindara	1,05	3,97	Pesisir
2	Bontomarannu	3,12	14,93	Pesisir
3	Barammase	2,24	8,47	Daratan
4	Bonto Kassi	2,86	14,78	Daratan
5	Sawakong	3,55	13,42	Daratan
6	Bentang	1,37	16,48	Daratan
7	Bonto Kanang	3,46	13,08	Pesisir
8	Popo	2,19	8,28	Pesisir
9	Tarawang	1,74	6,58	Daratan
10	Kadatong	1,05	1,10	Daratan
11	Kale Bentang	1,25	1,12	Daratan
12	Kaluku Bodo	0,83	1,89	Pesisir
Luas Wilayah Kec. Galesong Selatan		24,71	100	

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

Dari 12 desa hanya 5 yang terletak pada kawasan pesisir, yakni Desa Mangindara, Desa Bontomarannu, Desa Bonto Kanang, Desa Popo dan Desa Kaluku Bodo.

b. Kependudukan

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah merupakan aset pembangunan yang akan berperan dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam mendukung perkembangan industri, perdagangan, jasa, dan sumber daya pesisir.

Dengan jumlah penduduk terbanyak terletak pada Desa pesisir yakni Desa Bonto Kanang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Mangindara	2.571
2	Bontomarannu	1.961
3	Barammase	2.027
4	Bonto Kassi	1.975
5	Sawakong	3.217
6	Bentang	1.147
7	Bonto Kanang	4.164
8	Popo	2.289
9	Tarawang	2.023
10	Kadatong	1.231
11	Kale Bentang	1.193
12	Kaluku Bodo	1.597
Jumlah		25.396

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

2) Perkembangan Penduduk Dua Tahun Terakhir

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 25.115 jiwa dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 25.395 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Perkembangan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Galesong Selatan
2016

No	Desa	2016	2017	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Mangindara	2.523	2.571	1,90
2	Bontomarannu	1.939	1.961	1,13
3	Barammase	2.021	2.027	0,30
4	Bonto Kassi	1.945	1.975	1,54
5	Sawakong	3.175	3.217	1,32
6	Bentang	1.132	1.147	1,33
7	Bonto Kanang	4.130	4.164	0,82
8	Popo	2.283	2.289	0,26
9	Tarawang	1.996	2.023	1,35
10	Kadatong	1.212	1.231	1,57
11	Kale Bentang	1.179	1.193	1,19
12	Kaluku Bodo	1.580	1.597	108
Jumlah		25.115	25.395	1,11

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

3) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kecamatan Galesong Selatan dalam Kurun waktu 2014 hingga 2015, nampak mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sekitar 1.016,39 jiwa/km² dan pada tahun 2015 naik menjadi 1.027,72 jiwa/km². Di tahun 2015 jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Mangindara, yakni sekitar 2.448,57 jiwa/km², diikuti Desa Bontokanang sekitar 1.023,47 jiwa/km². Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Bontomarannu yakni sekitar 628,53 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Mangindara	2.448,57
2	Bontomarannu	628,53
3	Barammase	904,91
4	Bonto Kassi	609,56
5	Sawakong	906
6	Bentang	837,23
7	Bonto Kanang	1.203,47
8	Popo	1.045,21
9	Tarowang	1,162,64
10	Kadatong	1.172,38
11	Kale Bentang	954,40
12	Kaluku Bodo	1.924,10
	Jumlah	1.027,72

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

4) Penduduk dengan mata pencaharian

Mata pencaharian pokok tiap desa di Kecamatan Galesong yang terbanyak adalah pertanian dengan jumlah 4.783 yang dimana di desa sawakong memiliki jumlah mata pencaharian petani sekitar 741, kemudian mata pencaharian terbanyak kedua yaitu nelayan dengan jumlah 3.093 yang diaman di desa Bonto Kanang memiliki jumlah mata pencaharian nelayan sekitar 1.135. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok Tiap Desa di Kecamatan
Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Pertanian	Nelayan	Industri Kerajinan	Konstruksi	Perdagangan
1	Mangindara	610	1.125	74	43	115
2	Bontomarannu	302	223	53	101	212
3	Barammamase	465	21	85	123	222
4	Bonto Kassi	375	6	146	128	207
5	Sawakong	741	7	118	269	309
6	Bentang	299	5	26	146	117
7	Bonto Kanang	296	1.135	31	207	310
8	Popo	316	415	36	103	208
9	Tarowang	524	4	162	136	154
10	Kadatong	286	4	61	42	184
11	Kale Bentang	313	11	26	32	198
12	Kaluku Bodo	256	135	52	128	183
Jumlah		4.783	3.093	870	1.458	2.419

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan

c. Kondisi Fisik Pantai dan Sumberdaya Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang tergenangi air sesaat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat dibedakan atas ekosistem yang bersifat alamiah dan ekosistem buatan. Yang termasuk dalam ekosistem alamiah adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari tambak, sawah pasang

surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman.

1) Hydro-Oceanografi

Kecamatan Galesong Selatan ditinjau dari sudut oceanografi memiliki daerah perairan atau laut. Hal ini dapat dilihat pada daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 95,8 km. Panjang pantai Daerah pesisir pantai tersebut cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan perikanan laut karena memiliki bermacam-macam hasil laut, seperti udang, ikan cakalang, kepiting dan hasil-hasil laut lainnya seperti rumput laut yang dewasa ini telah diusahakan oleh para nelayan.

Gelombang merupakan salah satu parameter oceanografi fisika yang sangat mempengaruhi kondisi pantai. Gelombang sebagai parameter yang sangat penting dalam suatu survey pantai dimana penyebab pembentuknya adalah akibat angin, letusan gunung api bawah laut, peristiwa tsunami dan akibat pergerakan tata surya. Data hasil pengukuran di lokasi survey pada wilayah pesisir Kecamatan Galesong Selatan yaitu berkisar antara 5,63 m/det – 20,25 m/det.

Pengukuran arah dan kecepatan arus pada daerah survey pantai dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang dampak hembusan angin dan diasumsikan arah arus mengikuti (searah) dengan pola sebaran angin. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan arus turbulensi dan pola arus menyebabkan proses sedimentasi pada daerah tersebut. Hasil pengukuran arus pada wilayah survey tersebut yaitu antara 0,13 – 0,93 m/det dengan arah 200 – 310, sedangkan arus yang terjadi dipantai umumnya adalah arus susur pantai.

Analisis pasang surut dimaksudkan untuk mengetahui tipe tipe pasang surut yang terjadi dalam suatu lokasi tertentu dalam sehari semalam. Dari hasil pengamatan pasang surut dilakukan menunjukkan bahwa daerah survey memiliki tipe pasang surut campuran, yaitu tipe diurnal dan semidiurnal.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemiringan pantai terhadap lautan. Dari hasil dan pengamatan yang dilakukan, kelandaian pantai pada wilayah Kecamatan Galesong Selatan secara umum untuk lokasi survey adalah kelandaian berkisar antar 43,3 % - 60 % ini menunjukkan bahwa daerah survey memiliki pantai yang terjal.

2) Bathimetri

Kondisi ombak di perairan Kecamatan Galesong Selatan sangat tergantung pada keadaan musim. Pada musim Timur dimana kecepatan angin bertiup berada pada kisaran 173,4 m/mnt sampai 117,6 m/mnt dapat membangkitkan gelombang laut dengan tinggi mencapai 0,5-1,2 meter. Sedangkan pada musim Timur yang memiliki kisaran kecepatan tiupan angin antara 133,2-45 m/dtk mampu membangkitkan gelombang yang mencapai ketinggian 0,4 – 1,4 meter.

3) Ekosistem Pesisir

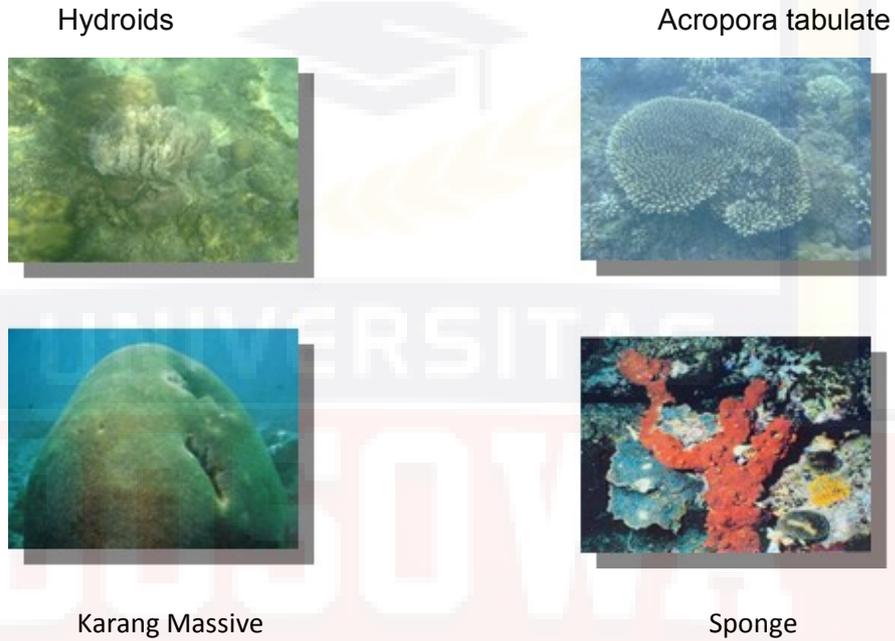
a. Terumbu Karang

Kecamatan Galesong Selatan ini memiliki terumbu karang yang terletak di Pantai Desa Popo dengan kondisi terumbu karang di daerah ini tergolong buruk dengan luas tutupan karang hidup kurang dari 25%. Kondisi ini diindikasikan dengan tingginya penutupan pada karang-karang yang mati yaitu 77% di pantai Selatan. (dilihat grafik 4.1) Komunitas bentik karang di perairan pantai Desa Popo didominasi oleh karang mati dan beralga dengan persentase penutupan 80%. Sedangkan persentase penutupan karang hidup hanya 10% yang

didominasi karang Massive, Karang Acropora Tabulate, kemudian jenis Sponge dan Hydroids sekitar 2%.

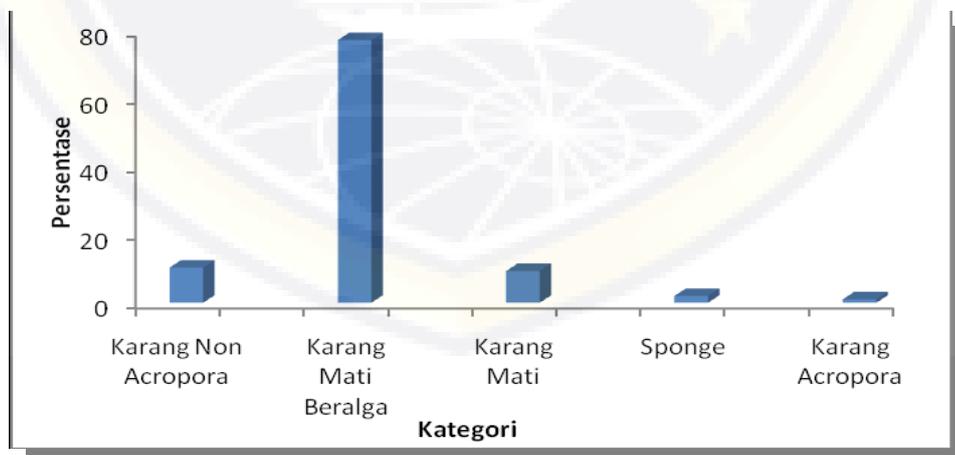
Gambar 4.1

Jenis - Jenis Karang yang Terdapat di Pantai Desa Popo.



Grafik 4.1

Grafik Persentase Penutupan Karang dan Alga di Perairan Pantai Desa Popo



Sumber: RENSTRA WP3K Takalar, 2016

b. Padang Lamun

Kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan ini memiliki ekosistem lamun yang cukup luas dan tumbuh subur di sekitar pesisir. Jenis lamun yang sering ditemui adalah *cymodocea rotundata*, *cymodocea serrulata*, *enhalus acoroides*, serta *thalasia hemprichi*. Keempat jenis lamun ini adalah yang sering ditemui di ekosistem pesisir dikarenakan penyebarannya yang luas serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan.

4) Perikanan

Untuk mendukung aktivitas nelayan maka harus didukung dengan perahu motor sehingga wilayah pencarian ikan bisa lebih luas dan dapat memuat hasil produksi perikanan yang ada. Alat transportasi pendukung perikanan tersebut berupa perahu tanpa motor, motor temple, dan kapal motor, yang hanya tersebar di kawasan pesisir dan pulau pada tahun 2015 sebanyak 2.357 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor 13 unit, motor tempel 1.950 unit dan kapal motor 394 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Jumlah Perahu/Motor Tempel menurut jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2015

No	Desa	Jenis Perahu/Tempel			Jumlah
		Perahu Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor	
1	Mangindara	3	308	100	411
2	Bontomarannu	3	531	94	628
3	Barammase	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	4	643	77	724
8	Popo	3	468	123	594
9	Tarawang	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-
Jumlah		13	1.950	394	2.357

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2016

Selain alat transportasi perahu juga harus didukung dengan peralatan penangkap ikan sehingga hasil tangkapan dapat maksimal. Beberapa jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan/masyarakat di kawasan pesisir antara lain payung, pukot cincing, pukot pantai, jaringa insang tetap, jermal, bubu dan lain sebagainya dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2015 adalah 4.834 unit (lihat tabel 4.9). Pemakaian alat tangkap ikan yang digunakan oleh penduduk harus selalu diawasi agar ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan yang memenuhi persyaratan untuk ditangkap dan menjaga kelestarian ekosistem laut yang saat

ini diperkirakan beberap potensi ikan laut akan punah karena pengendalian penangkapan ikan teratasi.

Tabel 4.9
Jumlah Alat Penangkapan Ikan (unit) Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Alat Tangkat Ikan (unit)												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Mangindara	19	2	4	15	75	105	-	9	37	27	669	54	1.016
2	Bontomarannu	16	26	4	27	115	120	-	16	46	30	782	87	1.269
3	Barammamase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	38	20	6	39	155	120	-	15	58	33	802	98	1.344
8	Popo	-	7	4	21	56	155	-	5	39	21	795	62	1.165
9	Tarowang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		73	55	18	102	401	500	-	45	180	111	3.048	301	4.834

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

Keterangan:

1. Payang	2. Pukat Cincing	3. Pukat Pantai
4. Jaring Insang Tetap	5. Rawai Tetap	6. Pancing Lain
7. Bagang Tancap	8. Sero	9. Jaring Insang Hanyut
10. Jermal	11. Alat Tangkap	12. Bubu/Pakaja

Jenis budidaya ikan yang diusahakan oleh penduduk Kecamatan Galesong Selatan secara umum dan kawasan pesisir pada khususnya adalah tambak, sungai, rawa dan kolam. Luas lahan pengembangan budidaya ikan di kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan sebesar 242 Ha(tabel 4.10). Usaha pengembangan budidaya ikan masih

berada pada berada pada kawasan pesisir saja tidak dikembangkan pada kawasan lautnya dengan mengembangkan ikan-ikan yang berpotensi ekspor dan bernilai jual lebih tinggi.

Tabel 4.10
Luas Areal (Ha) Budidaya Ikan di Kecamatan Galesong Selatan
Tahun 2016

No	Desa	Jenis Budidaya Ikan				Jumlah
		Tambak	Sungai	Rawa	Kolam	
1	Mangindara	36	3	6	-	45
2	Bontomarannu	49	11	5	2	67
3	Barammamase	-	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	51	7	10	1	69
8	Popo	45	10	5	1	61
9	Tarowang	-	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-	-
Jumlah		181	31	26	4	242

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka, Tahun 2017

Keluarga yang menggantungkan sumber perekonomiannya di sektor perikanan cukup banyak. Jumlah rumah tangga yang beraktivitas di lahan laut lebih banyak dibanding lahan tambak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kecamatan Galesong Selatan
Tahun 2016

No	Desa	Jenis Rumah Tangga Perikanan			Jumlah
		Laut	Tambak	Perairan Umum	
1	Mangindara	23	19	8	50
2	Bontomarannu	27	29	12	68
3	Barammamase	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	15	28	16	59
8	Popo	30	20	15	65
9	Tarawang	-	-	-	-
No	Desa	Jenis Rumah Tangga Perikanan			Jumlah
		Laut	Tambak	Perairan Umum	
10	Kadatong	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	5	2	3	10
Jumlah		100	98	54	252

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka, Tahun 2017

Sebaran penduduk menurut jenis pekerjaan yang beraktivitas sebagai nelayan tidak hanya di kawasan pesisir dan, tetapi kawasan lainnya seperti Desa Barammamase dan Kaluku Bodo juga masih adanya nelayan. Dari jumlah penduduk sebagai nelayan tersebut, pada umumnya bekerja di perairan laut disamping di lahan tambak dan perairan umum. Jumlah nelayan yang bekerja di laut sebanyak 5.185 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12

Jumlah Nelayan (orang) Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Nelayan Menurut Jenisnya			Jumlah
		Laut	Tambak	Perairan Umum	
1	Mangindara	1.067	15	6	1.088
2	Bontomarannu	1.007	28	9	1.044
3	Barammase	526	10	-	536
4	Bonto Kassi	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	1.020	16	10	1.046
8	Popo	1.037	29	9	1.075
9	Tarawang	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	528	19	-	547
Jumlah		5.185	117	34	5.336

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka, Tahun 2017

Potensi lain pada kawasan pesisir adalah tersedianya lahan pengembangan usaha tambak untuk pengembangan ikan dan udang. Umumnya usaha tambak tersebar di kawasan pesisir dengan jumlah produksi pada tahun 2015 sebanyak 283 ton. Jenis budidaya yang dilakukan pada lahan tambak adalah ikan bandeng 82 ton dan udang 75 ton. Untuk lebih jelasnya produksi tambak menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13

Jumlah Produksi Tambak Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Produksi Tambak (ton)			Jumlah
		Bandeng	Udang	Ikan Lainnya	
1	Mangindara	15	31	28	74
2	Bontomarannu	25	20	13	58
3	Barammase	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	20	40	10	70
8	Popo	22	35	24	81
9	Tarowang	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-
Jumlah		82	126	75	283

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka, Tahun 2017

Gambar 4.2
Tambak di Desa Bontomarannu



Sumber: Survey Lapangan 2018

Gambar 4.3
Tambak di Desa Popo



Sumber: Survey Lapangan 2018

Usaha perikanan yang diusakan menurut perairan umum dapat dibagi tiga jenis yakni sungai, rawa dan kolam, yang kesemuanya hanya dilakukan pada kawasan darat saja dengan jumlah produksi ikan secara keseluruhan adalah 40 ton. Ini mengindikasikan bahwa potensi perikanan pada perairan umum masih didominasi di kawasan pesisir dengan jumlah produksi ikan terbanyak pada

Tabel 4.14

Jumlah Produksi Ikan di Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Jenis Produksi Ikan (ton)			Jumlah
		Laut	Rawa	Kolam	
1	Mangindara	5	3	2	10
2	Bontomarannu	7	4	1	12
3	Barammase	-	-	-	-
4	Bonto Kassi	-	-	-	-
5	Sawakong	-	-	-	-
6	Bentang	-	-	-	-
7	Bonto Kanang	8	4	3	17
8	Popo	2	1	-	3
9	Tarawang	-	-	-	-
10	Kadatong	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	-
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-
Jumlah		22	12	6	40

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka, Tahun 2017

5) Obyek Wisata

Sumberdaya pariwisata yang terdapat di Kecamatan Galesong Selatan hanya ada di Desa Bontomarannu, Dusun Bonto Rita yaitu Pantai Rita. Potensi sumberdaya pariwisatanya di Kecamatan Galesong Selatan sangat baik akan tetapi pemerintah setempat dan masyarakatnya tidak memperhatikan.

B. Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi

1. Sarana Perkantoran

Terdapat beberapa fasilitas perkantoran yang menjadi tempat pelayanan publik bagi masyarakat Galesong Selatan

diantaranya yang terletak di ibu kota kecamatan (desa Bontokassi) yaitu kantor Camat Galesong Selatan, Kantor desa Bontokassi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan. Sedangkan yang terletak di masing-masing desa adalah kantor desa masing-masing.

2. Sarana Perdagangan

Di Kecamatan Galesong Selatan took sebanyak 13 buah, Kios/Kedai dan warung makan umumnya banyak terdapat di Desa Bonto Kassi, karena Desa ini merupakan ibu kota Kecamatan. Jumlah toko di Desa Bonto Kassi sebanyak 5 buah, kios/kedai sebanyak 339 buah tersebar di 12 desa di Kecamatan Galesong Selatan dan warung makan sebanyak 6 buah. Dan sisanya tersebar di semua desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Jumlah Perdagangan di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2015

No	Desa	Pasar	Toko	Kios/Kedai	Warung Makan	Jumlah
1	Mangindara	-	-	17	-	17
2	Bontomarannu	-	-	24	-	24
3	Barammase	-	2	31	1	34
4	Bonto Kassi	-	5	43	3	51
5	Sawakong	-	-	29	-	29
6	Bentang	-	1	28	-	29
7	Bonto Kanang	-	1	22	-	23
8	Popo	-	-	31	-	31
9	Tarowang	-	-	25	-	25
10	Kadatong	-	2	28	1	31
11	Kale Bentang	-	2	31	1	34
12	Kaluku Bodo	-	-	30	-	30
	Jumlah	-	13	339	6	358

Sumber: Kecamatan Galesong, Dalam Angka 2016

3. Sarana Pendidikan

Untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar di wilayah Kecamatan Galesong Selatan, maka pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan bagi warga Kecamatan Galesong Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Galesong Selatan
Tahun 2016

No	Desa	TK	SD	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat
1	Mangindara	-	2	-	-
2	Bontomarannu	-	2	-	1
3	Barammase	-	2	1	-
4	Bonto Kassi	1	3	1	1
5	Sawakong	-	1	-	-
6	Bentang	-	2	-	-
7	Bonto Kanang	-	1	-	-
8	Popo	1	2	2	2
9	Tarowang	-	1	-	-
10	Kadatong	1	2	1	-
11	Kale Bentang	-	2	-	-
12	Kaluku Bodo	-	1	-	-
	Jumlah	3	21	5	4

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

4. Sarana Kesehatan

Perhatian Pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Galesong Selatan, belum semuanya memiliki saran dan prasarana kesehatan misalnya di Desa Bontomarannu dan Desa Bontokassi ada puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4.17
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2016

No	Desa	Fasilitas Kesehatan				Tenaga Kesehatan			
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskedes	Posyandu	Dokter Umum /Gigi	Perawat	Bidan	Dukun Bayi
1	Mangindara	-	1	-	4	-	1	2	3
2	Bontomarannu	1	1	-	3	2	2	1	2
3	Barammase	-	1	-	3	-	3	1	2
4	Bonto Kassi	1	-	-	3	2	1	2	1
5	Sawakong	-	1	-	3	-	1	2	1
6	Bentang	-	-	-	5	-	1	1	1
7	Bonto Kanang	-	-	-	4	-	1	1	3
8	Popo	-	1	-	3	-	1	1	3
9	Tarowang	-	-	1	4	-	1	1	2
10	Kadatong	-	-	1	2	1	2	1	1
11	Kale Bentang	-	-	-	5	-	2	1	2
12	Kaluku Bodo	-	-	1	3	-	1	1	3
Jumlah		2	5	3	42	5	17	15	24

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

5. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang ada di Kecamatan Galesong Selatan berupa masjid sebanyak 28 unit yang di semua desa dan 16 mushollah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Galesong Selatan 2016

No.	Desa	Fasilitas Peribadatan				
		Masjid	Mushollah	Gereja	Pura	Whara
1	Mangindara	1	1	-	-	-
2	Bontomarannu	2	2	-	-	-
3	Barammase	3	2	-	-	-
4	Bonto Kassi	3	1	-	-	-
5	Sawakong	2	1	-	-	-
6	Bentang	3	1	-	-	-
7	Bonto Kanang	3	1	-	-	-
8	Popo	2	1	-	-	-
9	Tarowang	2	1	-	-	-
10	Kadatong	2	2	-	-	-
11	Kale Bentang	2	2	-	-	-
12	Kaluku Bodo	1	1	-	-	-
Jumlah		28	16	-	-	-

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

C. Analisis – Analisis Pengembangan Kawasan Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan.

1. Analisis Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

**ANALISIS LOCATION QUOTIENT
KECAMATAN GALESONG SELATAN**

Adapun Tujuan Dari Analisis Location Quotient Sebagai Berikut :

- Untuk Mengetahui Kemampuan Suatu Sektor Kegiatan Tertentu
- Satuan Yang Digunakan : Jumlah Buruh, dan Jumlah Produksi
- Kesimpulan Yang di Peroleh Bersifat Kesimpulan sementara dan masih memerlukan kajian lanjut

**Tabel 4.19
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun) di Kecamatan Galesong Selatan**

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)								Jumlah Total Produksi (Ton/Tahun)
		Padi	Padi Ladang	Jagung	Ubi Jalar	Ubi Kayu	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mangindara	341,800	-	424,200	685.000	-	-	170,200	9,610	1.630,810
2	Bontomarannu	277,700	-	380.120	590.000	-	-	65,200	4,500	1.317,520
3	Barammamase	255,100	-	115,043	-	-	-	75,600	1,200	446,943
4	Bonto Kassi	201,100	-	222,033	389.000	-	-	4.200	5,240	821,573
5	Sawakong	98,900	-	-	-	-	-	-	1,730	100,630
6	Bentang	88,900	-	-	-	-	-	-	1,600	90,500
7	Bonto Kanang	254,200	-	129,200	480.000	-	-	-	1,520	864,920
8	Popo	129,400	-	123,620	290.000	-	-	-	2,600	545,620
9	Tarawang	94,500	-	-	313.000	-	-	-	3,970	411,470
10	Kadatong	135,400	-	98,024	153.000	-	-	-	2,750	389,174
11	Kale Bentang	112,400	-	-	-	-	-	-	-	112,400
12	Kaluku Bodo	69,700	-	88,022	-	-	-	-	-	157,722
Jumlah		2.059,100	-	1.580,262	2,900.000	-	-	315,200	34,720	6.889,282

Sumber : Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 4.20
Jumlah Produksi Perikanan Ton/Tahun) di Kecamatan Galesong Selatan

No	Kecamatan	Perikanan Jumlah Produksi (Ton/Tahun)				Jumlah Total Produksi (Ton/Tahun)
		Rumput Laut	Udang	Bandeng	Kolam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mangindara	716,590	661,810	652,520	13,200	2.044,120
2	Bontomarannu	650,960	249,940	249,940	10,810	1.161,650
3	Barammase	344,320	613,060	618,060	2,300	1.576,740
4	Bonto Kassi	-	-	-	-	-
5	Sawakong	396,340	183,920	182,900	3,230	766,390
6	Bentang	-	-	-	2,310	2,310
7	Bonto Kanang	109,640	24,470	22,470	-	156,580
8	Popo	257,080	460,490	423,490	41,050	1.182,110
9	Tarowang	252,420	169,410	156,410	0,90	581,140
10	Kadatong	-	-	-	-	-
11	Kale Bentang	-	-	-	1,300	1,300
12	Kaluku Bodo	-	-	-	-	-
Jumlah		2.727,350	2.362,100	2.305,790	74,100	7.469,340

Sumber : Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 4.21
Data Produksi Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2017

Jenis Komoditi	Jumlah Produksi Kabupaten (Ton/Tahun)	Sub Wilayah (Kecamatan)											
		Mangindara	Bontomarannu	Barammase	Bontokassi	Sawakong	Bentang	Bontokanang	Popo	Tarowang	Kadatong	Kalebentang	Kaluku Bodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tanaman Pangan	6.889,282	1.630,810	1.317,520	4.46,943	821,573	100,630	90,500	864,920	545,620	411,470	389,174	112,400	157,722
Perikanan	7.469,340	2.044,120	1.161,650	1.576,740	0	766,390	2,310	156,580	1.182,110	578,140	0	1,300	0
Jumlah	14.358,620	3.674,930	2.479,170	2.023,683	821,573	867,020	92,810	1.021,500	1.727,730	989,610	389,174	113,700	157,722

Sumber : Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 4.22
Perhitungan LQ

Jenis Komoditi	Sub Wilayah (Kecamatan)																	
	Mangindara			Bontomarannu			Barammase			Bontokassi			Sawakong			Bentang		
	R1		R2	R1		R2	R1		R2	R1		R2	R1		R2	R1		R2
Tanaman	44.377 /	0,925	23.672 /	53.144 /	1,108	19.124 /	22.086 /	0,658	6.488 /	100 /	2,084	11.925 /	11.606 /	0,242	1.461 /	97.511 /	2,032	1.314 /
Pangan	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594
Perikanan	20,59/	1,59	5,75/	6,92/	0,39	1,40/	33,44 /	2,80	10,10 /	0,00 /	0,00	0,00/	14,06/	2,06	7,45/	2.489 /	0,048	0.031 /
	12,94		3,61	17,86		3,61	11,96		3,61	5,94		3,61	6,82		3,61	52.020		25.594
Jumlah	1.99			2.01			2.16			2.08			1.94			2.08		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Tabel 4.22
Lanjutan Perhitungan LQ

Jenis Komoditi	Sub Wilayah (Kecamatan)																	
	Bontokanang			Popo			Tarowang			Kadatong			Kalebentang			Kaluku Bodo		
	<i>R1</i>		<i>R2</i>	<i>R1</i>		<i>R2</i>	<i>R1</i>		<i>R2</i>	<i>R1</i>		<i>R2</i>	<i>R1</i>		<i>R2</i>	<i>R1</i>		<i>R2</i>
Tanaman	84.672 /	1.765	12.555 /	31.580 /	0.867	7.920 /	41.579 /	0.867	5.973 /	100 /	2.084	5.649 /	98.857 /	2.06	1.632 /	100 /	2.084	2.289 /
Pangan	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594	47.980		25.594
Perikanan	15.328 /	0.295	2.096 /	68.420 /	1.315	15.826 /	58.421 /	1.123	7.740 /	0 /	0	0 /	1.143 /	0.022	0.017 /	0 /	0	0 /
	52.020		25.594	52.020		25.594	52.020		25.594	52.020		25.594	52.020		25.594	52.020		25.594
Jumlah	2.06			2.18			1.99			2.08			2.08			2.08		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Kesimpulan:

Dari hasil analisis Location Quotient di lihat dari 2 jenis komoditi yaitu tanaman pangan dan perikanan. Sub wilayah atau Kelurahan yang menjadi prioritas utama ialah berada di Kelurahan Barammase dengan jumlah total 2,18. Sedangkan Kelurahan yang kurang unggul dalam jenis ke 2 komoditi ini ialah Kelurahan Sawakong dengan jumlah Total 1,94.

2. Analisis SWOT

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tentang pengembangan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, untuk proses pengembangan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan agar mampu memanfaatkan kekuatan yang ada (*strength*) yang ada, sekaligus juga berupaya untuk mengurangi kelemahan (*weaknesses*) dan meminimalisir ancaman-ancaman (*threats*) yang akan mengganggu dan menghambat pengembangan pengelolaan sumberdaya pesisir. Untuk itu perlu ada kajian terhadap kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal secara peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal.

a. Internal Kawasan (IFAS)

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Tersedianya lahan pengembangan disekitar kawasan pesisir yang cukup mendukung (Aspek Ekonomi)
- b) Kondisi lingkungan yang cukup baik (Aspek Lingkungan)
- c) Berada di pusat kota dan tidak jauh dari kota Makassar (Aspek Sosial)

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

- a) Kurangnya sarana dan prasana yang menunjang sumberdaya pesisir (Aspek Ekonomi)
- b) Tidak adanya sistem pengelolaan (Aspek Sosial)

c) Lemahnya informasi pemerintah (Aspek Sosial)

Selanjutnya setelah mendapatkan data melalui survey langsung dan wawancara dengan responden langkah selanjutnya dengan pembobotan, rating dari masing-masing faktor sehingga akan didapatkan total skor untuk faktor strategi internal dan total skor untuk faktor eksternal. Berikut ini matrik faktor internal (IFAS) sebagai berikut:



Tabel 4.23
Internal Strategi Factor Analysis (IFAS)

Faktor Strategi Internal	Bobot	Nilai	Bobot X Nilai
KEKUATAN (S)			
1. Lahan pengembangan disekitar kawasan pesisir yang cukup mendukung	40	4	160
2. Wilayah pesisir memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata	40	4	160
3. Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan ditribusi sumberdaya ekonomi	20	2	40
TOTAL	100		360
KELEMAHAN (W)			
1. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan	35	3	105
2. Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir	25	2	50
3. Kemiskinan yang terkonsentrasi didaerah wilayah pesisir	40	3	120
Total Skor	100		275

Sumber: Hasil Analisis 2018

Keterangan Nilai:

1= Tidak Baik 2= Kurang Baik 3= Baik 4= Sangat Baik

b. Internal Faktor (EFAS)

1) Peluang (*Opportunities*)

- a) Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang banyak untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Aspek Ekonomi)

b) Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong Selatan (Aspek Ekonomi)

c) Adanya tekad pemerintah daerah dalam mengembangkan sumberdaya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong Selatan (Aspek Sosial)

d) Dorongan pemerintah setempat untuk memperkenalkan kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan (Aspek Sosial)

2) Ancaman (*Threats*)

a) Terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan apabila tidak diperhatikan (Aspek Lingkungan)

b) Terjadinya penambahan angka kemiskinan di Kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Selatan (Aspek Ekonomi)

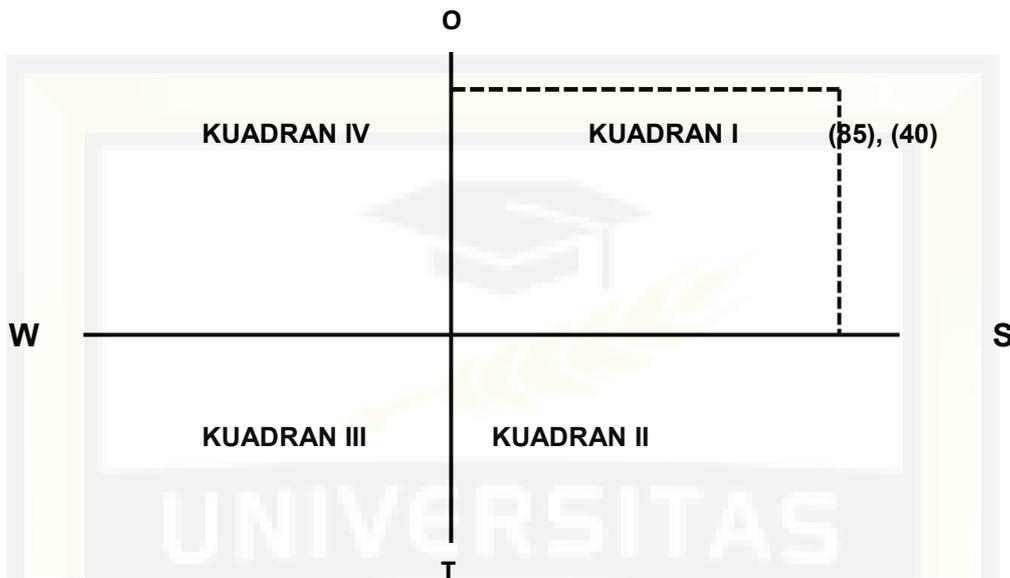
Tabel 4. 24
Eksternal Strategi Factor Analysis (EFAS)

Faktor Strategi External	Bobot	Nilai	Bobot X Nilai
PELUANG (O)			
1. Lahan pengembangan disekitar kawasan pesisir yang cukup mendukung	40	4	160
2. Wilayah pesisir memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata	20	3	60
3. Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi	40	4	160
TOTAL	100		380
ANCAMAN (T)			
1. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan	40	3	120
2. Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir	20	2	40
3. Kemiskinan yang terkonsentrasi didaerah wilayah pesisir	40	3	120
Total Skor	100		280

Keterangan Nilai:

1= Tidak Baik 2= Kurang Baik 3= Baik 4= Sangat Baik

Skema Analisis SWOT



Berdasarkan hasil perhitungan dengan skor IFAS (Kekuatan dan Kelemahan), yaitu $360 - 275 = 85$, sedangkan skor EFAS (Peluang dan Ancaman) yaitu $380 - 280 = 100$. Maka nilai IFAS dan EFAS sama-sama menunjukkan nilai positif (+) sehingga pengembangan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan yaitu di antara strategi kelemahan dan peluang (SO) yaitu pada Kuadran I

Kesimpulan:

- (IFAS) = Kekuatan - Kelemahan = $360 - 275 = 85$ (y)
- (EFAS) = Peluang - Ancaman = $380 - 280 = 100$ (x)

Tabel 4.25

**Matrix Analisis SWOT Pengembangan Sumberdaya Pesisir
Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar**

Faktor Faktor Eksternal	Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lahan pengembangan disekitar kawasan pesisir yang cukup mendukung 2. Kondisi lingkungan yang cukup baik 3. Berada di pusat kota dan tidak jauh dari kota Makassar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasana yang menunjang sumberdaya pesisir 2. Tidak adanya sistem pengelolaan 3. Lemahnya informasi pemerintah
Peluang (<i>Oppurtunities</i>)		Strategi SO (<i>Strengths and Oppurtunities</i>)	Strategi WO (<i>Weaknesses and Oppurtunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang banyak untuk dikembangkan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong Selatan 3. Adanya tekad pemerintah daerah dalam mengembangkan sumberdaya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong Selatan 4. Dorongan pemerintah setempat untuk memperkenalkan kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lahan pengembangan pariwisata 2. Selalu menjaga lingkungan dengan melakukan pelestarian dan pemeliharaan ekosistem pesisir 3. Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang lainnya secara berkelanjutan agar ekonomi masyarakat pesisir meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan sarana dan prasana untuk menunjang sumberdaya pesisir 2. Mengadakan sistem pengelolaan
Ancaman (<i>Threats</i>)		Strategi ST (<i>Strength and Threats</i>)	Strategi WT (<i>Weaknesses and Threats</i>)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan apabila tidak diperhatikan 2. Terjadinya pertambahan angka kemiskinan di Kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga lingkungan ekosistem pesisir 2. Melakukan sosialisasi terhadap penduduk atau masyarakat untuk terus mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada. 2. Melaksanakan sosialisasi untuk pengelolaan sumberdaya pesisir 3. Selalu mengupdate informasi tentang sumberdaya pesisir yang berkelanjutan
---	---	--

Sumber: Hasil Analisis 2018

Berdasarkan matriks SWOT yang ada, maka hasil analisis mengenai pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan maka kita menggunakan Strategi (SO) yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan (*Strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyiapkan lahan pengembangan pariwisata
2. Selalu menjaga lingkungan dengan melakukan pelestarian dan pemeliharaan ekosistem pesisir
3. Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang lainnya secara berkelanjutan agar ekonomi masyarakat pesisir meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient di lihat dari 2 jenis komoditi yang potensi dijadikan yaitu tanaman pangan dan perikanan. Sub wilayah atau Kelurahan yang menjadi prioritas utama ialah berada di Kelurahan Barammase dengan jumlah total 2,18. Sedangkan Kelurahan yang kurang unggul dalam jenis ke 2 komoditi ini ialah Kelurahan Sawakong dengan jumlah Total 1,94.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Selatan khususnya di Kelurahan Barammase harus melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan, yaitu:
 - a. Menyiapkan lahan pengembangan pariwisata (Aspek Sosial)
 - b. Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang lainnya secara berkelanjutan agar ekonomi masyarakat pesisir meningkat.(Aspek Lingkungan)

- c. Membuat kegiatan yang berkelanjutan untuk memperkenalkan kegiatan kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan.(Aspek Ekonomi)

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar meliputi:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong Selatan secara berkelanjutan.
 - b. Pemerintah dituntut untuk terus memperhatikan dan mengadakan pemeliharaan pada sumberdaya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong Selatan.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Galesong Selatan, khususnya yang berada pada kawasan pesisir agar lebih memperhatikan aspek ekologis agar keseimbangan lingkungan dan kealamian alam tetap terpelihara sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang ada di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syaiful. 2014. *Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat*, (Media Online: <https://pengelolaan-kawasan-pesisir-secara-terpadu-dan-berkelanjutan-berbasis-masyarakat-dipertasby.html>. 2014) diakses pada 10 April 2016
- Tampubolon, Jimmi. *Tata Ruang Laut Pesisir dan Lemahnya Political Will* (Media Online <https://maritim.co/tata-ruang-laut-dan-lemahnya-political-will/amp/>)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tengah. 2005. Rencana Pengelolaan Propinsi Sulawesi Tengah Kawasan "Marine and Costal Management Are (MCMA)". Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Sulawesi Tengah
- Basuki dan Djunaedi. 2002. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 3, No 3, September 2002: 225-231
- Bengen, D. 2009, *Pentingnya Keterpaduan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan*. IPB
- Bryant, C. dan L.G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES, Jakarta
- Dahuri, R. 1996. *Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan, makalah Seminar Sehari Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. PPLH-IPB, Ditjen Bangda dan ABD. Bogor, April
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.K. Sitepu, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Djojhadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta

- Depry Nur Annisa Ahmad. 2014. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Tepian Air (Waterfont) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Jufriadi. 2014. *Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta
- Manaf, Murshal. Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Muis, La Sara, Dasmin Sidu, 2010. Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Abeli Kota Kendari. Kendari
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG): Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nadjib, M. 1998. *Adaptasi Ekonomi Masyarakat Nelayan: Alternatif dan Ketidakpastian Lingkungan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, JEP VI No.2, hal 61-74*
- Nurani, Neni. 2012. *Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, (Media Online: <https://pelajar-mahasiswa-rangkuman-materi-kuliah-pemanfaatan-pengelolaan-wilayah-pesisir.html>. 2012) diakses pada 10 April 2016
- Patria, Andreas D. 1999. Analisis Kebijakan Pengembangan Parawisata Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Kasus di Pesisir Utara Pulau Bintan Kepulauan Riau). Tesis Magister Sains. Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Rahmat Hidayat, 2014. Studi Pengembangan Kawasan Wisata Taman Purbakala Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2008-2028
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabau, Nurhan. 2011. *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu (Studi Kebijakan dan Analisis Stakeholder)*. Skripsi Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor

